

# PENGANTAR KAJIAN SEJARAH **EKONOMI** **PERKOTAAN** INDONESIA



**Purnawan Basundoro**

Tabel 8.2 : Jenis Pajak dan Jumlah Pendapatan dari Tahun 1817 sampai Dihapuskan oleh Van der Capellen.....274

Tabel 8.3 : Hasil Sewa Pajak Opium dari Tahun 1816 sampai 1925 dan Persentasenya Terhadap Seluruh Pendapatan Sewa Pajak Pemerintah Kolonial .....277

Tabel 8.4 : Jumlah Rumah Gadai, Keuntungan, dan Total Aset Pegadaian Tahun 1901 sampai 1924 .....293

Tabel 8.5 : Jenis Pemasukan dan Hasil Pendapatan Tahun 1909 .....296

Tabel 8.6 : Struktur Pajak Selama Pelita I 1968 sampai 1973/1974 (dalam Persen) .....304

# Bab 1

## AKTIVITAS PASAR TRADISIONAL DI PERKOTAAN

Salah satu ciri ekonomi perkotaan adalah adanya aktivitas jual-beli yang berpusat di pasar. Secara teoretis pengertian pasar dalam konteks Barat mengacu pada kata Latin *mercatus* yang memiliki makna berdagang atau tempat berdagang. Makna tersebut kemudian berkembang menjadi minimal tiga hal: pasar dalam arti fisik, sebagai tempat mengumpulkan, hak atau ketentuan yang legal tentang suatu pertemuan pada suatu *marketplace*. Dalam konteks ilmu ekonomi, pengertian pasar mengalami perkembangan sejak abad ke-16, yaitu membeli dan menjual secara umum, dan penjualan (interaksi pertukaran) yang dikontrol oleh penawaran dan permintaan (*supply and demand*). Pengertian terakhir itulah yang dipakai oleh ilmu ekonomi sampai saat ini.<sup>1</sup>

Antropolog dari Amerika Serikat yang selama bertahun-tahun meneliti mengenai kehidupan masyarakat Jawa, Clifford Geertz dalam bukunya *Penjaja dan Raja*, mencoba menelusuri akar istilah pasar. Menurutnya kata pasar mengacu pada bahasa Parsi (melalui bahasa Arab) *bazar*, yang artinya suatu pranata ekonomi dan sekaligus cara hidup, suatu gaya umum dari kegiatan ekonomi yang mencapai segala aspek dari masyarakat Jawa pada umumnya, dan suatu dunia sosial-budaya yang hampir lengkap dalam sendirinya. Lebih lanjut Geertz mengemukakan bahwa pasar adalah gejala alami dan juga gejala kebudayaan yang bisa dilihat sebagai arus barang dan jasa me-

<sup>1</sup> Damsar and Indrayani, *Pengantar Sosiologi Pasar*, (Jakarta: Kencana-PrenadaMedia Group, 2018), h. 9.

nen, upah, hubungan utang, dan persewaan. Aktivitas perdagangan merupakan aktivitas kedua setelah pertanian. Terbentuknya pasar mengacu kepada hal tersebut, perdagangan bukan aktivitas utama. Namun demikian, pada perkembangannya banyak orang menjadikan aktivitas perdagangan sebagai aktivitas utama sehingga melahirkan profesi pedagang.<sup>4</sup>

Mengacu pada pernyataan yang dilontarkan oleh J.C. van Leur bahwa terbentuknya pasar terkait erat dengan terbentuknya peradaban agraris, maka cikal-bakal pasar kuno kemungkinan besar ada di kawasan perdesaan. Barang yang diperdagangkan di pasar-pasar pada waktu itu tentu saja sebagian besar adalah kebutuhan sehari-hari berupa hasil bumi, seperti sayur-mayur, beras, buah-buahan, sirih dan pinang. Peralatan rumah tangga dan peralatan pertanian juga diperjualbelikan di pasar, seperti alat-alat dapur yang terbuat dari anyaman bambu, gerabah; alat-alat pertanian seperti cangkul, sabit, mata pisau bajak; pakaian, sarung, celana; alat penangkap ikan seperti kepis, bubu; bahan makanan, gula, garam; binatang ternak seperti kerbau, sapi, kambing, itik, ayam, dan lain-lain. Barang-barang yang diperdagangkan di pasar, yang sebagian besar merupakan hasil bumi dan alat-alat pertanian, memperkuat teori tentang adanya peradaban pertanian.

Beberapa prasasti memberi keterangan lebih lanjut mengenai aktivitas pasar pada periode kuno. Salah satu prasasti yang cukup detil menggambarkan aktivitas perdagangan di pasar pada periode Mataram Kuno adalah Prasasti Panggumulan yang saat ini menjadi koleksi Museum Sonobudoyo di Yogyakarta. Prasasti Panggumulan menyebutkan orang-orang yang menjual beras dari Desa Tunggalan ke pasar di Desa Sindingan.<sup>5</sup> Aktivitas penjualan beras tersebut mungkin berhubungan erat dengan keadaan pasar pada waktu itu, di mana keberadaan pasar biasanya bergilir dari satu desa ke desa lainnya mengikuti hari pasaran.

Masyarakat Jawa kuno mengenal adanya konsep pasaran yang berjumlah lima hari (*pancawara*) dan mengacu pada aktivitas sebuah pasar. Pasaran menurut masyarakat Jawa kuno adalah Kaluwan/Kli-

won, Umanis/Manis/Legi, Pahing, Pwan/Pon, Wagai/Wage. Satu rotasi atau siklus yang lamanya lima hari pada masyarakat Jawa disebut *sepasar*. Menurut Nastiti adanya rotasi pasar mengacu pada konsep *panatur desa* dan *panasta desa* yang dalam perkembangannya dikenal dengan konsep *mancapat* dan *mancalima*, yaitu satu desa induk dikelilingi oleh empat desa lainnya yang terletak di empat arah mata angin, atau satu desa induk dikelilingi oleh delapan desa yang terletak di arah delapan mata angin. Namun demikian, desa-desa yang mengelilingi desa induk tidak selalu persis pada empat atau delapan penjurus mata angin karena bisa jadi pada pas titik tertentu mata angin ada jurang, sungai, danau, hutan, atau pegunungan sehingga di tempat-tempat tersebut tidak ada desa.<sup>6</sup>

Rotasi aktivitas pasar mengacu pada konsep pancawara, dengan dimulai dari desa induk dengan pasaran Kliwon, selanjutnya akan bergilir pada empat desa lainnya masing-masing pada pasaran Manis/Legi, Pahing, Pon, dan Wage, dan pada hari keenam akan kembali lagi pada desa induk. Demikian seterusnya, sehingga setiap lima hari sekali satu pasar akan kembali beraktivitas melayani kebutuhan masyarakat. Ada pula pasar yang aktivitasnya bukan hanya sekali dalam satu siklus pasaran, melainkan dua kali, misalnya Manis dengan Wage, Pon dengan Kliwon.

Pasar-pasar kuno secara fisik masih amat sederhana. Pasar waktu itu hanyalah sekelompok orang menggelar dagangan di tepi-tepi jalan dengan tempat seadanya. Untuk menghindari terik matahari, banyak aktivitas jual-beli dilakukan di bawah pohon rindang, biasanya di bawah pohon beringin yang besar. Aktivitas perdagangan waktu itu karena kapasitasnya yang kecil hanya dilakukan di tempat-tempat seadanya. Ketika jumlah pedagang di bawah pohon semakin banyak dan melebar ke tempat yang terkena sinar matahari, maka dicarilah akal bagaimana agar mereka dan barang yang dijual tidak kepanasan oleh terik matahari. Didirikanlah gubuk-gubuk untuk berdagang yang tidak bersifat permanen, bahkan gubuk-gubuk itu bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Gubuk semacam itu oleh sebagian masyarakat Jawa disebut *bango*. Pasar-pasar yang dikelola oleh lembaga desa dan lembaga pemerintahan lokal lainnya biasanya

<sup>4</sup> J.C. van Leur, *Perdagangan dan Masyarakat Indonesia: Esai-esai Tentang Sejarah Sosial dan Ekonomi Asia Tenggara*, (Yogyakarta: Ombak, 2018), h. 67-69.

<sup>5</sup> Poesponegoro and Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia II: Zaman Kuno*, h. 255.

<sup>6</sup> Titi Surti Nastiti, *Pasar di Jawa Masa Mataram Kuna Abad VIII-XI Masehi*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 2003), h. 54.

berbeda dengan pasar harian biasa. Adanya sifat-sifat khas tersebut, menyebabkan Uroe Gantoe berkembang sampai mempunyai lebih dari satu fungsi, yaitu fungsi ekonomi dan serangkaian fungsi sosial lainnya seperti pemerintahan. Pada saat diadakan Uroe Gantoe tokoh-tokoh masyarakat berkumpul untuk mendiskusikan segala hal, mulai masalah pertanian, kehidupan sehari-hari, hingga masalah politik.<sup>10</sup>

## B. TAWAR-MENAWAR: CIRI PERDAGANGAN DI PASAR

Salah satu ciri pasar di Indonesia adalah adanya tawar-menawar terhadap harga barang yang dijual oleh pedagang. Di sini berlaku prinsip bahwa pedagang ingin barang dagangannya laku dengan harga tinggi sementara pembeli menginginkan agar barang bisa dimiliki dengan membayar rendah kepada pedagang. Tawar-menawar adalah salah satu prinsip untuk mencapai keseimbangan dan kepuasan di masing-masing pihak. Ia mewedahi antara keinginan pedagang agar barang dagangannya laku dengan harga ideal dan tidak rugi, serta keinginan pembeli agar bisa membayar barang yang diinginkan dengan harga ideal pula.

Cara jual-beli dengan tawar-menawar sudah ada sejak zaman dahulu kala. Ketika proses jual-beli masih dilakukan dengan cara tukar-menukar barang (barter), tawar-menawar sudah dilakukan agar masing-masing pihak tidak merasa dirugikan. Menurut Nastiti, sejak orang-orang Cina pertama kali berdagang di kawasan Nusantara sistem barter dan penggunaan uang sudah berjalan beriringan. Pada saat itu cara jual-beli dengan tawar-menawar tentu saja sudah berjalan. Penggunaan mata uang merupakan bukti adanya aktivitas tawar-menawar tersebut, karena munculnya uang sebagai alat tukar merupakan konsekuensi logis adanya kebutuhan akan benda-benda yang dapat dihitung untuk tujuan tukar-menukar secara tidak langsung.<sup>11</sup> Tawar-menawar dalam jual beli bertujuan agar tercapai keseimbangan, baik secara ekonomis maupun psikologis pada pihak penjual dan pembeli, antara uang sebagai alat tukar dengan nilai barang yang ditukar.

Tawar-menawar dalam jual-beli di pasar-pasar di Indonesia sering kali berlangsung cukup lama dan alot karena masing-masing pihak mempertahankan nilai ideal dan motivasi mendapatkan keuntungan atas sebuah barang. Menurut Clifford Geertz tawar-menawar yang alot merupakan gambaran tentang tidak adanya pembukuan yang kompleks dan perhitungan anggaran atau biaya jangka panjang. Hal tersebut telah menyulitkan pihak pembeli maupun penjual untuk menghitung setepat-tepatnya berapa harga yang pantas untuk sebuah barang. Dalam situasi di mana data-data historis dan komparatif yang sangat spesifik sama sekali tidak ada, maka penetapan harga lebih merupakan perkiraan saja.<sup>12</sup> Perkiraan atas harga sebuah barang telah menyebabkan tawar-menawar menjadi keharusan dan menjadi sebuah seni dalam proses jual-beli di pasar. Lebih lanjut Geertz mengemukakan bahwa tawar-menawar merupakan sebuah keharusan ketika masing-masing pihak berada dalam situasi ketidakpastian mengenai harga sebuah barang.

Dalam sistem tawar-menawar, terdapat pedagang di pasar yang selalu berusaha mencari kesempatan untuk mengeruk keuntungan besar atau kecil, dan tidak mau berusaha mencari langganan tetap yang stabil atau mendirikan usaha dagang yang tumbuh dengan tetap dan teratur. Kondisi tersebut bukanlah kondisi umum yang menghingapi para pedagang di pasar. Artinya, tidak semua pedagang berorientasi pada keuntungan material semata. Di Jawa terdapat peribahasa yang mengacu pada pola hubungan yang lebih manusiawi antara pedagang dengan pembeli, yaitu *tuna sathak bathi sanak*, yang artinya walaupun keuntungan tidak banyak yang penting (pembeli) menjadi saudara. Dengan menjadikan pembeli sebagai "saudara" maka diharapkan ia akan menjadi pelanggan abadi. Transaksi dengan cara tawar-menawar tetap lestari sampai saat ini, walaupun di pasar-pasar tertentu di kota-kota besar kondisinya sudah jauh berubah. Banyak pembeli menginginkan hal yang praktis, meminta pedagang untuk menawarkan barang dengan harga pasti dan tidak perlu tawar-menawar.

Ketika orang-orang Belanda datang di Indonesia pada periode yang paling awal, yaitu pada abad ke-17, mereka juga melihat ke-

<sup>10</sup> Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh, *Uroe Gantoe pada Masyarakat Aceh*, (Banda Aceh: Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh, 2007).

<sup>11</sup> Nastiti, h. 99.

<sup>12</sup> Geertz, *Penjaja dan Raja: Perubahan Sosial dan Modernisasi Ekonomi di Dua Kota Indonesia*, h. 34.

Saya melihat perahu-perahu kano menjajakan barang-barang dagangan seperti sepatu berbagai warna, burung kakatua, burung parkit, kera, berlian, emas, perak, dan benda-benda terbuat dari tulang ataupun tanduk.<sup>16</sup>

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, pasar-pasar di kota pantai merupakan pasar metropolis yang didatangi para pedagang dari berbagai daerah dan berbagai negara. Banyak pedagang dari luar yang kemudian menetap di kawasan kota pantai di Indonesia. Kesaksian Selberg mengenai pasar di Kota Surabaya menguatkan hal tersebut. Menurutny para pedagang dari Bugis yang datang ke Surabaya membawa barang dagangan dari pulau lain berupa kapur barus, lilin, sarang burung, kura-kura, sarung, pakaian dari kain tenun, biji emas, dan lain-lain. Mereka meninggalkan pelabuhan Surabaya dengan membawa barang dagangan berupa candu, besi, baja, kain buatan Eropa, barang-barang dari India, beras, tembakau, garam, dan lain-lain.<sup>17</sup>

Selain perdagangan yang langsung dilakukan di bibir pantai, kota-kota pantai sejatinya juga memiliki pasar yang berada di daratan. Pasar tersebut biasanya malah lebih dinamis karena orang dengan berbagai latar belakang sosial dan etnis bisa masuk ke dalam pasar untuk terlibat dalam kegiatan jual-beli. Kota-kota besar di Indonesia memiliki pasar lebih dari satu yang tersebar di beberapa titik di kota tersebut. Pada masa kolonial Kota Batavia memiliki beberapa pasar, antara lain Pasar Tanah Abang, Pasar Senen, Pasar Rebo, Pasar Minggu, dan lain-lain. Nama-nama pasar di Batavia mengacu pada aktivitas pasar tersebut yang mengacu pada nama-nama hari di mana pasar tersebut beroperasi. Hal tersebut menunjukkan bahwa aktivitas pasar-pasar di Batavia berlangsung secara bergiliran antara satu pasar dengan pasar lainnya. Berbeda dengan pasar-pasar di Jawa yang aktivitasnya mengacu pada hari pasaran yang jumlahnya lima hari, aktivitas pasar di Jakarta mengacu pada hari umum yang berjumlah tujuh hari.

Kota Surabaya memiliki beberapa pasar yang namanya mengacu pada nama kampung di mana pasar tersebut berada. Pasar paling penting di Kota Surabaya pada masa kolonial adalah Pasar Pabean yang terletak di Kampung Pabean di tepi sungai Kalimas. Pasar lainnya adalah

Pasar Genteng, Pasar Turi, Pasar Bong, Pasar Peneleh, Pasar Kalianyar, Pasar Pegirian, Pasar Ampel, dan Pasar Keputran. Jumlah pasar di Kota Surabaya mengalami perkembangan yang sangat signifikan ketika kota ini ditetapkan sebagai kota otonom dengan status *gemeente*. Sampai tahun 1915 jumlah pasar di Kota Surabaya hanya 9 buah, tetapi pada tahun 1938 melonjak menjadi 43 buah, yang tersebar di berbagai kampung di Kota Surabaya.<sup>18</sup> Kota Semarang memiliki beberapa pasar, yaitu Pasar Johar, Pasar Jurnatan, Pasar Pekojan, Pasar Pedamaran, Pasar Kampung Melayu, Pasar Regang, dan beberapa pasar kampung lainnya. Pasar terbesar di Kota Semarang sejak masa kolonial adalah Pasar Johar.<sup>19</sup>

Sejalan dengan perkembangan kota-kota di Indonesia pada periode kolonial, pasar-pasar juga mengalami perkembangan. Pasar diposisikan sebagai salah satu elemen penting dari sebuah kota karena merupakan pusat perekonomian sekaligus sebagai sarana untuk pengumpulan modal. Begitu pentingnya keberadaan sebuah pasar sehingga pada masa kolonial sebagian penyelenggaraan pasar diambil alih oleh pemerintah kolonial, serta ada pemodal-pemodal Belanda yang berinisiatif mendirikan pasar. Di Batavia, Pasar Senen dan Pasar Tanah Abang merupakan pasar yang didirikan oleh perorangan, seorang Belanda yang telah lama menetap di Batavia. Pasar Senen dan Pasar Tanah Abang didirikan oleh Justinus Vinck, seorang pewaris tanah di kawasan Weltevreden. Justinus Vinck memiliki naluri bisnis yang kuat, sehingga mendirikan pasar di bagian Timur Weltevreden pada tahun 1735. Setelah itu ia mendirikan pasar di Tanah Abang. Dari kedua pasar tersebut Vinck memungut cukai setiap hari pasaran.

Pasar Senen ketika baru didirikan masih dikenal dengan nama *Vinckpasser* atau Pasar Vinck karena didirikan oleh Justinus Vinck. Namun karena hari pasarannya mula-mula hanya hari Senin, masyarakat pun menyebutnya Pasar Senen.<sup>20</sup> Pada mulanya bangunan Pasar Senen hanya berupa gubuk-gubuk sederhana, barang dagangannya pun masih sebatas barang kebutuhan sehari-hari masyarakat setempat, utamanya sayuran. Tahun 1749, Vinck menjual kawasan Weltevreden

<sup>16</sup> Tjiptoadmodjo, h. 141.

<sup>17</sup> D. Eduard Selberg, *Reis Naar Java En Bezoek Op Het Eiland Madoera*, (Amsterdam: Van Kampen, 1846), h. 127-128.

<sup>18</sup> 'Soerabaja Nummer', *Locale Techniek*, 2 Maret-April (1939), h. 57.

<sup>19</sup> Putri Agus Wijayati, 'Sejarah Sosial Pasar Johar Semarang pada Abad Ke-20', (Universitas Dajah Mada, 2018), h. 66.

<sup>20</sup> Intisari, *Batavia: Kisah Jakarta Tempo Doeloe*, (Jakarta: Gramedia, 1988), h. 74.

Selain memperbaiki pasar, di beberapa kota pemerintah kolonial Belanda membangun pasar baru. Tahun 1820 di Batavia dibangun Pasar Baru, yang pada waktu itu dikenal dengan nama *Passer Baroe* atau *De Nieuw Markt*. Kemungkinan cikal bakal pasar tersebut sudah muncul sejak zaman VOC, namun masih merupakan pasar kecil yang belum berkembang. Sejak pemerintah kolonial Belanda membangun pasar tersebut perlahan-lahan berkembang menjadi pasar besar di Batavia, melengkapi dua pasar yang telah berkembang sebelumnya yaitu Pasar Senen dan Pasar Tanah Abang.<sup>23</sup> Pasar Baru memiliki dagangan yang amat lengkap. Pedagang di pasar ini berasal dari berbagai etnis. Pedagang tekstil sebagian besar berasal dari India, yang umumnya dari Kota Bombay dan Calcuta. Namun demikian, pedagang etnis Tionghoa mendominasi pasar ini.

Pada pertengahan abad ke-19, pemerintah kolonial Belanda membangun Pasar Baru Bandung. Pasar tersebut merupakan pindahan pasar lama yang semula berada di daerah Ciguriang yang terbakar hebat akibat kerusuhan pada tahun 1842. Pasar Baru mengalami perkembangan signifikan sejak dibangun menjadi pasar megah pada tahun 1906. Pasar ini pernah dinobatkan sebagai pasar paling bersih dan paling teratur di Hindia-Belanda. Sebagian besar pedagang di tersebut adalah pedagang lokal, yaitu para saudagar Sunda. Hanya sebagian kecil saja pedagang yang berlatar belakang etnis Tionghoa dan etnis Arab pada waktu itu. Beberapa nama pedagang besar bahkan diabadikan sebagai nama jalan yang terletak di sekitar Pasar Baru, antara lain H. Basar, Ence Ajis, H. Durasid, H. Pahruroji, serta Soeniaradja. Masyarakat Kota Bandung pada umumnya menyebut para saudagar yang berjualan di Pasar Baru dengan sebutan *Orang Pasar*.<sup>24</sup>

Pasar-pasar di perkotaan, mengalami perkembangan pesat sejak diterapkannya undang-undang otonomi yang diterbitkan oleh pemerintah kolonial Belanda tahun 1903, yang dikenal dengan nama *Decentralisatie Wet 1903*. Undang-undang tersebut merupakan undang-undang yang mengatur otonomi daerah, utamanya daerah-daerah perkotaan. Kota-kota yang memiliki penduduk Eropa cukup banyak ditetapkan sebagai daerah otonom dengan nama *gemeente*, yang ke-

mudian ditingkatkan menjadi *stadsgemeente*. Kota yang ditetapkan sebagai *gemeente* diberi wewenang untuk mengelola kotanya tanpa campur tangan gubernur jenderal.<sup>25</sup>

#### D. PASAR SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN KOTA

Sejak dikeluarkannya undang-undang otonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Belanda tahun 1903, kota-kota yang diberi status sebagai kota otonom atau *gemeente* dibebani kewajiban untuk mencari uang untuk membiayai operasional pemerintahan. Salah satu sumber keuangan yang cukup penting adalah pasar. Pasar merupakan sarana ekonomi perkotaan yang pengelolaannya diserahkan kepada *gemeente* bagi kota-kota yang telah ditetapkan sebagai *gemeente*. Pasar merupakan sumber pendanaan yang cukup besar selain rumah pemotongan hewan (*slacht huis*), perusahaan penyewaan tanah dan rumah (*grondbedrijf*), serta usaha lainnya. Pada periode ini pasar dijadikan sebagai unit usaha yang dikelola oleh lembaga tersendiri yang disebut *passerbedrijf* atau perusahaan pasar. *Passerbedrijf* merupakan cikal bakal perusahaan daerah pasar, yang saat ini dikenal dengan nama PD. Pasar. Sejak periode itu pasar-pasar di perkotaan dikelola secara profesional dan ditata dengan baik. Pengelola pasar merupakan sebuah lembaga terstruktur yang induknya adalah *passerbedrijf*. *Passerbedrijf* bertanggung jawab kepada walikota (*Burgermeester*).

Di beberapa kota besar *passerbedrijf* atau perusahaan pasar dikelola secara profesional dan memiliki struktur organisasi yang jelas. Hal tersebut menunjukkan bahwa pasar harus dikelola dengan sebaik-baiknya karena merupakan salah satu sumber pendapatan strategis bagi pemerintah kota pada waktu itu. Pada tahun 1917 pengurus perusahaan pasar di Kota Surabaya adalah sebagai berikut:

Administratur	: A.M.J. de Roock
Administratur pembantu	: P.J. Dekeyzer
Kepala pasar kelas 1	: Tamanoeprodo
Kepala pasar kelas 2	: Mangoendisastro
Kepala gudang	: Mas Rasioen
Juru tulis	: Mangkoeredjo
Mandor	: Ambia, Djojomasmito <sup>26</sup>

<sup>23</sup> Purnawan Basundoro, *Pengantar Sejarah Kota*, (Yogyakarta: Ombak, 2012), chap. 7.

<sup>25</sup> Gemeente Soerabaja, *Verslag Der Gemeente Soerabaja over 1917*, (Surabaya: E. Fuhri & Co, 1917), h. 24.

<sup>23</sup> Kebudayaan, h. 32.

<sup>24</sup> Intisari, h. 47.

Fasilitas pendukung yang dibangun antara lain tempat bongkar muat barang, tempat parkir, serta akses jalan menuju pasar.<sup>35</sup>



**GAMBAR 1.4: PASAR BESAR MEDAN PADA 1933**

Sumber: Gemeente Medan, *Officieele Pasar Malam en Centrale Pasar Gids*, (Medan: Gemeente Medan, 1933), hlm. 38.

Pasar-pasar yang dibangun pada awal abad ke-20 tersebut sampai saat ini sebagian masih dimanfaatkan dengan baik. Pasar Johar sempat berkali-kali mengalami kebakaran tetapi sampai sekarang masih bisa dimanfaatkan dengan baik setelah dilakukan perbaikan. Hal yang sama juga terjadi pada Pasar Pabean. Pasar tersebut pernah terbakar hebat namun saat ini masih bisa digunakan. Namun kondisi pasar-pasar tersebut cukup memprihatinkan, karena kurang terawat dan cenderung dibiarkan. Pemerintah kota hanya memosisikan pasar-pasar lama tersebut sebagai sumber pendapatan namun kurang bisa merawatnya dengan baik.

## E. PASAR TRADISIONAL SEJAK MASA PENJAJAHAN JEPANG

Awal tahun 1942, ditandai dengan beralihnya kekuasaan dari penjajah Belanda kepada penjajah Jepang di Indonesia. Perubahan kekuasaan tersebut telah mengubah banyak hal, utamanya kondisi ekonomi. Pascakrisis ekonomi dunia tahun 1930 kondisi ekonomi

<sup>35</sup> Medan, *Officieele Pasar Malam En Centrale Pasar Gids*, h. 29.

berangsur-angsur membaik, dan kemakmuran mulai dirasakan kembali. Sayangnya kondisi tersebut terputus dengan kedatangan penjajah Jepang. Kedatangan Jepang ke Indonesia tentu saja untuk menguasai bahan-bahan mentah yang terdapat di sini. Jepang telah merencanakan dua tahap, yaitu tahap penguasaan yang dilanjutkan dengan tahap menyusun kembali struktur ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan-bahan untuk perang.<sup>36</sup>

Proses untuk menguasai Indonesia ternyata direspons oleh Belanda dengan cara menghancurkan objek-objek vital perekonomian dengan cara dibumihanguskan. Akibatnya, saat Jepang mulai menguasai Indonesia mereka menghadapi kehidupan ekonomi yang lumpuh. Kita tahu bahwa sebelumnya elemen ekonomi dikuasai oleh Belanda, dan dengan perginya orang-orang Belanda maka aktivitas ekonomi menjadi tersendat. Jaringan perdagangan internasional juga mengalami kelumpuhan akibat berkobarnya perang serta dikuasainya jalur-jalur perdagangan laut oleh tentara Jepang. Kondisi tersebut menyebabkan seluruh aktivitas perekonomian di Indonesia berada pada titik paling bawah. Perdagangan eceran di pasar-pasar juga mengalami penurunan drastis, di samping karena langkanya barang yang diperjualbelikan juga karena Jepang mengontrol secara ketat distribusi berbagai kebutuhan pokok. Jepang bahkan pada akhirnya menerapkan kebijakan penjatahan barang kebutuhan pokok, dengan pengaturan dan pengawasan yang sangat ketat. Pelanggaran akan hal tersebut dikenakan hukuman yang sangat berat.<sup>37</sup>

Barang-barang eceran buatan pabrik berangsur-angsur hilang dari pasar-pasar di perkotaan karena pabrik-pabrik berhenti beroperasi. Barang-barang tekstil yang sebagian besar merupakan barang impor benar-benar hilang dari kios-kios di pasar karena impor kain terhenti. Penjatahan kain dari Jepang juga amat minim sehingga banyak orang akhirnya memakai pakaian dari bahan seadanya, seperti karung goni atau dari bahan lembaran karet. Di beberapa kota, ketiadaan barang-barang pabrik telah memunculkan kreativitas masyarakat. Mereka yang memiliki keterampilan membuat barang-barang kebutuhan rumah tangga mencoba membuatnya dari bahan dan resep yang mere-

<sup>36</sup> Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notokusanto, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1992), h. 41.

<sup>37</sup> Poesponegoro and Notokusanto, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI*.

sering mengalami situasi semacam itu antara lain gula pasir, garam, minyak tanah. Kondisi semacam itu tentu saja sering menggelisahkan masyarakat.<sup>41</sup>

Pada tahun 1950-an keterlibatan pemerintah untuk mengontrol pasar cukup tinggi karena mereka harus memastikan bahwa kebutuhan pokok masyarakat sebisa mungkin harus terpenuhi, utamanya kebutuhan akan pangan. Pemerintah kota sangat tergantung pada pemerintah pusat dalam hal pengelolaan kebutuhan pokok masyarakat. Pada periode itu penjatahan beras sering dilakukan, dengan cara masyarakat diberi kartu beras yang secara periodik dipakai untuk membeli jatah beras. Harga beras di pasar-pasar kota pada saat itu sekitar Rp 2,30 sampai Rp 2,40 per kilogram pada saat musim panen. Ketika musim panen telah berakhir, harga beras bisa melambung antara Rp 4-Rp 5 per kilogram.

Perhatian terhadap pasar tradisional perlahan-lahan mulai meningkat seiring dengan semakin strategisnya peran pasar untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Di beberapa kota pasar ditingkatkan kapasitasnya, dengan cara memperluas area pasar dan membangunnya menjadi pasar yang megah. Kapasitas ruang untuk berdagang menjadi bertambah banyak, jenis barang yang diperjualbelikan juga semakin beragam. Pasar Wonokromo di Kota Surabaya yang semula merupakan pasar sederhana terbuat dari bahan kayu dan sebagian tembok, pada tahun 1954 direhab menjadi pasar yang megah berlantai dua. Pembangunan pasar baru berjalan sekitar satu tahun dan selesai tahun 1955. Pasar Wonokromo berkembang menjadi salah satu pasar terkemuka di Kota Surabaya. Para pedagang di pasar ini rata-rata memiliki jaringan dagang yang luas, bahkan sampai ke luar Jawa. Pasar Wonokromo juga menjadi salah satu tujuan para jemaah haji dari Indonesia Timur yang saat itu harus transit di pelabuhan Surabaya. Mereka membeli oleh-oleh untuk sanak-saudaranya di pasar ini.



GAMBAR 1.5: PEMBANGUNAN PASAR WONOKROMO PADA 1954

Sumber: <https://pasarsurya.surabaya.go.id/index.php/pasar-wonokromo/>

Pemerintah memosisikan pasar sebagai salah satu sarana untuk menyejahterakan rakyat Indonesia yang telah merdeka. Pasar-pasar dibangun menjadi lebih megah dan lebih luas agar bisa menampung jumlah pedagang yang lebih banyak serta agar para pembeli lebih nyaman dalam berbelanja. Salah satu perkembangan menarik dari pasar-pasar tradisional di perkotaan adalah munculnya pasar induk, yaitu pasar utama di suatu kota yang dikembangkan menjadi lokasi perkulakan oleh para pedagang dari berbagai tempat. Pasar induk biasanya merupakan pasar terbesar di ibukota kabupaten atau provinsi yang bisa menampung pedagang dengan jumlah yang banyak. Para pedagang tidak hanya melayani penjualan secara eceran namun juga melayani penjualan partai besar untuk kemudian dijual lagi. Pasar induk menjadi simpul jaringan perdagangan berskala luas, sehingga jumlah komoditas yang diperjualbelikan juga dalam jumlah besar.

Ciri lain dari pasar induk adalah adanya komoditas yang dominan yang diperjualbelikan di pasar tersebut. Secara umum pasar induk berfungsi untuk penjualan barang secara grosir atau partai besar.<sup>42</sup> Salah satu contohnya adalah Pasar Induk Cipinang yang merupakan

<sup>41</sup> Sadhyoko, h. 31.

<sup>42</sup> Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, *Laporan Sementara Analisis Pendirian Pasar Induk*, (Jakarta: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2019), h. 26.



Pasar Induk Terong mendapatkan suplai jeruk nipis dari Kabupaten Luwu dan Selayar. Dari dua kabupaten tersebut jeruk yang dikirim ke Pasar Induk Terong bisa mencapai ratusan ton dalam sebulan. Daerah lain penghasil jeruk nipis adalah Bone, Sidrap, dan Sengkang, namun dengan jumlah yang hanya puluhan ton saja dalam sebulan. Jeruk nipis yang telah terkumpul di Pasar Induk Terong sebagian kecil dibeli oleh pengecer serta para pemilik warung makan yang menjual coto dan ikan bakar. Sementara yang paling banyak justru dikirim keluar kota, seperti ke Jakarta yang membutuhkan pasokan sekitar 40-45 ton per bulan, Surabaya 30 ton per bulan, Kalimantan 30-40 ton per bulan, Ambon 10-20 ton per bulan, Papua sekitar 20 ton per bulan.<sup>48</sup>

Pasokan jeruk nipis dari daerah penghasil sangat tergantung pada waktu panen jeruk yang ternyata dalam sebulan ada masa jeda sekitar 15 hari tanpa panen. Hal tersebut menyebabkan terjadinya kekurangan stok jeruk nipis di Pasar Induk Terong, padahal para pedagang coto dan ikan bakar sangat membutuhkan keberadaan komoditas ini. Untuk mengatasi agar stok jeruk nipis tidak benar-benar kosong di Pasar Induk Terong, para juragan harus mendatangkan dari pasar-pasar di luar Makassar, salah satunya dari Pasar Induk Kramat Jati Jakarta. Nah, dari mana jeruk nipis yang dijual di Pasar Induk Kramat Jati? Ternyata dari Pasar Induk Terong Makassar. Alhasil jeruk dari Pasar Induk Terong yang telah dikirim ke Jakarta harus kembali lagi ke tempat asal dengan harga yang sudah jauh lebih mahal, bisa sampai dua kali lipat. Inilah yang dimaksudkan sebagai distribusi berputar dengan pola lingkaran. Kembalinya jeruk nipis dari Jakarta ke Makassar tentu saja setelah melalui perjalanan berputar-putar dulu. Kadang jeruk nipis dikirim ke Manado terlebih dahulu, dari Manado dikirim ke Surabaya, sesampai di Surabaya kemudian dikirim ke Jakarta, dan setelah tiba di Jakarta ternyata dikirim lagi ke Makassar untuk memenuhi kebutuhan para pedagang coto dan ikan bakar di kota ini.

Perpindahan komoditas dari satu pasar ke pasar lain tentu saja telah mengubah harga menjadi semakin mahal yang disebabkan karena ongkos transportasi serta kutipan untuk keuntungan para pedagang. Jeruk nipis dibeli dari petani di Luwu Rp 1.000 per kilogram. Jeruk tersebut dikirim ke Manado dengan harga Rp 2.500 per kilogram.

<sup>48</sup> Habibie dan Rachman, h. 13.

Pengepul Manado mengirimnya ke Surabaya dengan harga Rp 4.000 per kilogram. Juragan di Surabaya mengirim ke Jakarta dengan harga Rp 6.000 per kilogram. Bila jeruk sampai Pasar Induk Kramat Jati Jakarta dan dikirim lagi ke Makassar harganya sudah menjadi Rp 10.000 per kilogram, sehingga di Makassar para pengecer menjualnya seharga Rp 12.000 per kilogram.<sup>49</sup> Pola distribusi komoditas seperti itu tentu saja tidak hanya terjadi pada jeruk nipis, namun bisa juga terjadi pada komoditas lain. Para produsen dan konsumen kemungkinan besar tidak memahami realitas distribusi barang yang diproduksi dan dikonsumsinya karena distribusi barang memang menjadi ranah para pedagang perantara.

Pasar tradisional di perkotaan sepanjang sejarahnya telah berperan sebagai sumber rezeki bagi banyak orang. Mereka yang terlibat dalam aktivitas perdagangan beserta seluruh komponen pendukungnya telah mendapatkan bagian-bagian keuntungan sesuai porsinya. Selain pedagang, yang mendapatkan keuntungan dari penyelenggaraan pasar tradisional sangat banyak, mulai dari petugas kebersihan, pegawai pasar, kula angkut, pekerja transportasi, tukang parkir, dan lain-lain. Pasar tradisional telah menjadi salah satu media pembagian rezeki di kota kepada banyak orang.

<sup>49</sup> Habibie dan Rachman, h. 14.